

RINGKASAN

NADA NABILAH **Penegakan Hukum Terhadap Pengguna Sepeda Listrik Di Jalan Raya Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 45 Tahun 2020 Tentang Kendaraan Tertentu Dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik (Studi Penelitian Di Wilayah Hukum Polres Bireuen)**
(Dr. Muhammad Nasir, S.H., LL.M. dan Dr. Muhammad Nur, S.H., M.H.)

Meningkatnya angka kecelakaan lalu lintas yang melibatkan sepeda listrik menjadi permasalahan serius karena banyak pengendara masih mengoperasikan sepeda listrik di jalan raya tanpa mematuhi ketentuan yang berlaku. Fenomena ini menunjukkan lemahnya penegakan hukum terhadap aturan dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 45 Tahun 2020 tentang Kendaraan Tertentu dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik, yang membatasi penggunaan sepeda listrik hanya pada jalur atau kawasan tertentu. Kondisi tersebut juga terlihat di wilayah Satlantas Polres Bireuen, dimana kasus pelanggaran dan kecelakaan terus meningkat tanpa penyelesaian yang efektif. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk mengkaji penegakan hukum terhadap pengendara sepeda listrik di jalan raya serta menilai efektivitas pelaksanaan regulasi yang telah ditetapkan pemerintah.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk penegakan hukum, mengidentifikasi kendala, dan menganalisis upaya Satlantas Polres Bireuen dalam mengatasi meningkatnya penggunaan sepeda listrik di jalan raya.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif dan bersifat deskriptif, sumber data dikumpulkan melalui wawancara dengan Anggota Satlantas Polres Bireuen, akademisi, pengguna sepeda listrik. Pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi dan wawancara, kemudian dianalisis secara deskriptif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap pengendara sepeda listrik di jalan raya oleh Satlantas Polres Bireuen merupakan kombinasi strategis antara pendekatan represif, namun masih menghadapi kendala multidimensi. Satlantas memprioritaskan edukasi dan sosialisasi di sekolah serta patroli rutin untuk mengatasi rendahnya kesadaran masyarakat dan pandangan sepeda listrik sebagai mainan. Sementara itu, tindakan represif seperti penilangan atau penyitaan bersifat situasional dan terbatas, terhambat oleh kekosongan hukum yang tidak menyediakan sanksi pidana spesifik, serta keterbatasan sumber daya operasional, dengan demikian, upaya yang ada menunjukkan respons adaptif untuk menjembatani kesenjangan hukum dan sosial, meskipun efektivitasnya belum optimal dan keberhasilan penuhnya sangat bergantung pada adanya dukungan regulasi yang lebih jelas.

Untuk mengatasi masalah penegakan hukum sepeda listrik, disarankan agar Satlantas Polres Bireuen membuat mekanisme penindakan sanksi tegas untuk agar kesadaran masyarakat meningkat secara efektif.

Kata Kunci : Penegakan Hukum, Pengendara, Sepeda Listrik, Jalan Raya.

SUMMARY

NADA NABILAH
NIM 210510279

Law Enforcement Against Electric Bicycle Riders On Public Roads Based On The Minister Of Transportation Regulation Number 45 Of 2020 Concerning Certain Vehicles Using Electric Motors (A Research Study in the Bireuen Police Jurisdiction)
(Dr. Muhammad Nasir, S.H., LL.M. and Dr. Muhammad Nur, S.H., M.H.)

The increasing number of traffic accidents involving electric bicycles has become a serious problem, as many riders continue to operate electric bicycles on public roads without complying with existing regulations. This phenomenon reflects the weak enforcement of the Ministry of Transportation Regulation No. 45 of 2020 concerning Certain Vehicles Using Electric Motor Drives, which restricts the use of electric bicycles to specific lanes or designated areas. This condition is also evident in the jurisdiction of the Bireuen Police Traffic Unit (Satlantas Polres Bireuen), where cases of violations and accidents continue to rise without effective resolution. Therefore, this research is essential to examine the enforcement of laws against electric bicycle riders on public roads and to evaluate the effectiveness of the implementation of government regulations.

The purpose of this study is to identify the forms of law enforcement, determine the obstacles encountered, and analyze the efforts of Satlantas Polres Bireuen in addressing the increasing use of electric bicycles on public roads.

This study employs an empirical juridical research type with a qualitative and descriptive approach. Data sources were collected through interviews with members of Satlantas Polres Bireuen, academics, and electric bicycle users. Data collection was conducted through documentation and interviews, and the results were analyzed descriptively.

The findings of this research indicate that law enforcement against electric bicycle riders on public roads by Satlantas Polres Bireuen is a strategic combination of preventive and repressive approaches but still faces multidimensional challenges. The traffic unit prioritizes education and outreach programs in schools as well as regular patrols to address the low level of public awareness and the common perception of electric bicycles as toys. Meanwhile, repressive actions such as issuing fines or confiscations are situational and limited, constrained by legal loopholes that do not provide specific criminal sanctions and by limited operational resources. Thus, the current efforts represent an adaptive response to bridge legal and social gaps, although their effectiveness remains suboptimal and their full success depends heavily on the establishment of clearer regulatory support.

To address the issue of law enforcement on electric bicycle use, it is recommended that Satlantas Polres Bireuen develop a firm sanction enforcement mechanism to effectively increase public awareness.

Keywords: Law Enforcement, Riders, Electric Bicycle, Public Roads.